

## **PERANCANGAN APLIKASI PERHITUNGAN PAJAK TAHUNAN PPH PASAL 21 PADA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Yo' Eli Hulu<sup>1</sup>, Denni M Rajagukguk<sup>2</sup>,**

Prodi Komputerisasi Akuntansi , Universitas Imelda Medan<sup>1,2</sup>  
Email: yoeli2@gmail.com<sup>1</sup>, rajagukguk12@gmail.com<sup>2</sup>

### ***Abstract***

*A new in the world of emerging organization introduced in line with the term information technology and information systems, namely how a well oriented organization and interact using computers, telecommunications applications and suggestions to improve its performance significantly. The development of science and technology information has been covering the world community today. As part of the world community, we certainly do not want to miss and information technology is growing. There are many ways that can be taken to determine the technological developments that are happening. One way is to use a computer as a means for processing and information. Similarly, the National Unity Politics and Public Protection Provincial Government of North Sumatera are still many difficulties in employee annual tax data processing to minimize the time and cost of operations. Therefore the author tries to make design knowledge Income Tax Calculation Application of Article 21 In Politics of National Unity and Community Protection Provincial Government of North Sumatera by using Visual Basic 6.0 and Ms. Acces, this application can manage the data of tax calculation and overcome existing difficulties.*

**Keywords:** *Bakesbangpollinmas, Applications, Tax.*

### **Abstrak**

Sebuah Era baru didalam dunia organisasi muncul sejalan dengan diperkenalkan istilah teknologi informasi dan sistem informasi, yaitu bagaimana sebuah organisasi baik berorientasi dan berinteraksi menggunakan perangkat komputer, aplikasi dan sarana telekomunikasi untuk meningkatkan kinerjanya secara signifikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah meliputi masyarakat dunia saat ini. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, kita tentunya tidak ingin ketinggalan teknologi dan informasi yang sedang berkembang. Ada banyak cara yang dapat ditempuh untuk mengetahui perkembangan teknologi yang sedang terjadi. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan komputer sebagai sarana untuk pengolahan data dan informasi. Demikian halnya dengan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang masih banyak mengalami kesulitan dalam pengolahan data pajak tahunan pegawai untuk meminimalkan waktu dan biaya dalam operasionalnya. Oleh karena itu Penulis mencoba membuat Perancangan Aplikasi Perhitungan Pajak Tahunan PPh Pasal 21 Pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan *visual basic 6.0 dan Ms. Acces*, aplikasi ini dapat mengelola data penghitungan pajak dan mengatasi kesulitan yang ada.

**Kata Kunci :** *Bakesbangpollinmas, Aplikasi, Pajak.*

## **1. PENDAHULUAN**

Seperti halnya negara lain di dunia, Indonesia disamping menyelenggarakan pemerintahan umum juga melaksanakan pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut diperlukan dana yang terus meningkat sejalan dengan peningkatan volume dan dinamika pembangunan itu sendiri. Dalam rangka pemenuhan pembiayaan negara baik untuk belanja rutin maupun pembangunan, sumber penerimaan dalam negeri diluar migas semakin ditingkatkan pencapaiannya melalui penerimaan dari

sektor pajak, sekaligus menjaga kemantapan dan kestabilan pendapatan negara.

Pajak adalah sektor utama sumber penerimaan Negara yang cukup besar dan memberikan peranan yang sangat penting untuk membiayai pengeluaran dan belanja dari suatu Negara. Setiap warga Negara yang memiliki penghasilan wajib membayar Pajak Penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dari segi ekonomi, pajak merupakan perpindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Bagi sektor publik, pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pembangunan, sedangkan bagi sektor privat, pajak dipandang sebagai beban.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Dari berbagai jenis pajak penghasilan yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi negara. Kebijakan pemerintah dalam mengatur Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 antara lain dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994, kemudian dirubah kembali dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, dan terakhir kali diubah dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan dalam negeri. Untuk itu, sebagai perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib menyetor pajak penghasilan ke kantor Pajak yang telah ditetapkan. Di Indonesia system pemungutan pajak yang digunakan adalah Self Assesment System, yaitu system dimana Wajib Pajak menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. System ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya.

Akan tetapi, wajib pajak sering melakukan kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan yang menyebabkan terjadinya pajak yang disetor terlalu besar atau terlalu kecil. Sehingga kantor pajak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Untuk itu penulis ingin mengetahui bagaimana sebenarnya perhitungan pajak yang dilakukan perusahaan sehingga terjadi peyeteroran pajak yang terlalu besar atau terlalu kecil.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan judul "Perancangan Aplikasi Perhitungan Pajak Tahunan PPh Pasal 21 Pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara" sebagai judul Tugas Akhir. Alasan penulis melakukan penelitian pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, karena instansi tersebut merupakan salah satu instansi pemerintah yang sudah ditetapkan sebagai instansi kena pajak. Adapun tujuan penulis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur perhitungan pajak Tahunan PPh Pasal 21 yang berjalan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

## 2. METODELOGI PENELITIAN

Populasi adalah seluruh item yang ada" (2005:631), selain itu definisi lain dari Moh. Nazir dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian menjelaskan bahwa: " populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan " (2005:271). Berdasarkan definisi populasi di atas penulis menyimpulkan bahwa populasi adalah karakteristik dan objek yang diteliti, adapun yang menjadi populasi dari penelitian penulis adalah populasi laporan pajak Tahunan PPh Pasal 21 tahun 2015. Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi, adapun yang menjadi sampel dari penelitian penulis adalah sampel laporan pajak Tahunan PPh pasal 21 bulan Maret tahun 2015.

Objek penelitian yang dilakukan oleh Penulis menguraikan penjelasan tentang Perancangan Aplikasi Perhitungan Pajak Tahunan PPh Pasal 21 Pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan *Microsoft Visual Basic 6.0 dan database Microsoft Access 2007*.

Desain penelitian data primer dan data sekunder adalah desain pengumpulan data yang efisien dengan alat dan teknik serta karakteristik dari responden. Jika peneliti ingin menggunakan data sekunder, maka si peneliti harus mengadakan evaluasi terhadap sumber, keadaan data sekundernya dan juga si peneliti harus menerima limitasi-limitasi dari data tersebut. (2005:88). Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa desain penelitian merupakan proses yang diperlukan dalam pelaksanaan dan perancangan penelitian.

Penelitian akademik merupakan penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa dalam membuat skripsi, tesis, dan disertasi serta merupakan sarana edukatif, sehingga lebih mementingkan validitas internal (caranya harus benar), variabel penelitian terbatas, serta kecanggihan analisis disesuaikan dengan jenjang pendidikan. (2002:4). Alasan penulis memakai jenis penelitian akademik adalah agar dalam pembuatan tugas akhir dapat dibuat dengan cara-cara yang benar dan terstruktur. Penulis menggunakan penelitian data primer karena data yang didapat dari hasil wawancara langsung, sedangkan data sekunder karena data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara.

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, metode survey dan explanatoris karena penulis membutuhkan penggambaran tentang sistem yang berjalan, penulis juga terjun langsung kelapangan dan mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan judul penelitian.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Rancangan Sistem yang Diusulkan

Dengan menganalisa dan mengaveluasi sistem yang sedang berjalan, maka dibuatlah perancangan aplikasi perhitungan pajak tahunan PPh pasal 21 pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan sehingga dapat mempercepat proses informasi yang akurat dan akan menampilkan informasi yang berhubungan dengan perancangan aplikasi perhitungan pajak tahunan PPh pasal 21 pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sistem yang akan dirancang adalah perancangan aplikasi perhitungan pajak tahunan PPh pasal 21 dengan menggunakan *Microsoft Access* dan bahasa pemrograman *Microsoft Visual Basic 6.0*, membuat basis data atau pun database yang sesuai dengan produk pertisi. Dan diharapkan dengan adanya sistem yang akan dirancang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam sistem yang sedang berjalan.

#### Deskripsi Jabatan Yang Masih Digunakan Dan Diusulkan

Pada penelitian ini tidak ada deskripsi jabatan yang diusulkan dan masih menggunakan deskripsi jabatan yang sudah ada, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian ini sebagai berikut:

##### 1. Pegawai

Pegawai Negeri adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas dalam suatu jabatann negeri, atau disertai tugas abdi negara, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### 2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan tugas pokoknya adalah Untuk membantu Sekeretaris sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :

- 1) Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan refrensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 2) Melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja sekretariat dan sub bagian keuangan.
- 3) Melaksanakan penyusunan rencana dan perubahan anggaran
- 4) Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan.
- 5) Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan.
- 6) Melaksanakan pembinaan pembendaharaan keuangan.
- 7) Melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan.
- 8) Melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya.

### 3. Kepala Badan

Tugas dan Fungsi Kepala Badan adalah Membantu Gubernur Sumatera Utara dalam melaksanakan urusan pemerintahan Daerah/Kewenangan Provinsi di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Administrasi Umum, Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Pembinaan Politik dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat serta tugas pembantuan.

1. Kepala Badan Menyelenggarakan Fungsi
  - a. Perumusan Kebijakan Teknis Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat.
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat.
  - c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas dibidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat.
  - d. Pelaksanaan tugas pembantu dibidang kesatuan Bangsa, politik dan perlindungan Masyarakat.
  - e. Pelaksanaan pelayanan administrasi Internal dan Eksternal.

### Kebijakan Sistem Informasi yang Diusulkan dan Masih Digunakan pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Pada dasarnya, dalam penelitian ini tidak ada kebijakan baru yang diusulkan jika dilihat dari kebijakan prosedur kasus. Kebijakan yang diusulkan lebih menekankan kepada cara Perancangan aplikasi serta pengolahan dan pembuatan laporan, dimana kebijakan sistem informasi yang diusulkan dengan menggunakan pangkalan data atau basis data sebagai media penyimpanan data-data untuk melakukan perhitungan Pajak tahunan PPh pasal 21.

Penghitungan pajak tahunan PPh pasal 21 secara terkomputerisasi telah menjadi keharusan atau kebijakan dari Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, untuk mendapatkan laporan secara tepat dan cepat.

### Formulir dan Dokumen yang Diusulkan

Dokumen yang digunakan dan diperlukan untuk menghitung pajak PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Surat perintah membayar SPM

Surat Perintah Membayar merupakan rangkaian yang penting di suatu perusahaan khususnya instansi untuk mencairkan alokasi dana atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan instansi tersebut



**Gambar 1. Surat Perintah Pembayaran (SPM)**  
(Sumber : Peraturan Menteri keuangan No. 206/PMK.011/2012)

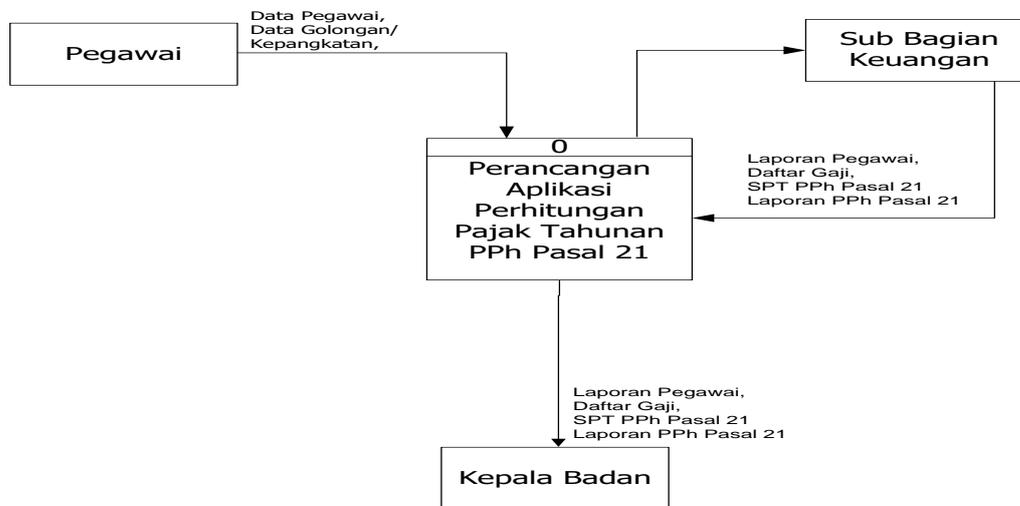




Gambar 4. Surat Setoran Pajak (SSP) Yang Dicitak

### Perancangan Model Sistem Yang Diusulkan Diagram Alur Data (DAD) Sistem Yang Diusulkan Diagram Konteks

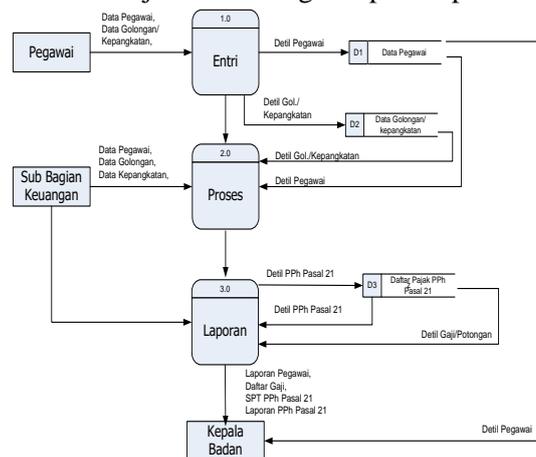
Context Diagram merupakan level tertinggi dalam data flow diagram (DFD), digunakan untuk menggambarkan secara global mengenai sistem yang dirancang dari sistem informasi. Sistem yang akan dirancang secara menyeluruh yaitu adanya gambaran secara jelas ruang lingkup pembahasan dimana sebagai mediana adalah berupa context diagram. Diagram konteks yang diusulkan dalam perancangan aplikasi pajak tahunan Pph pasal 21. Pada diagram konteks ini terdapat 3 entitas seperti pada gambar dibawah ini.



Gambar 5. Diagram Konteks Yang Diusulkan

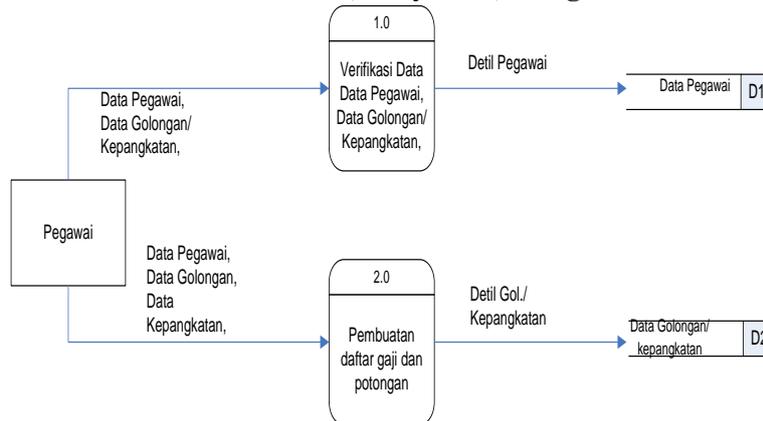
### Data Flow Diagram Level 0 Yang Diusulkan

Data Flow Diagram level 0 Menjelaskan mengenai proses perhitungan Pph pasal.



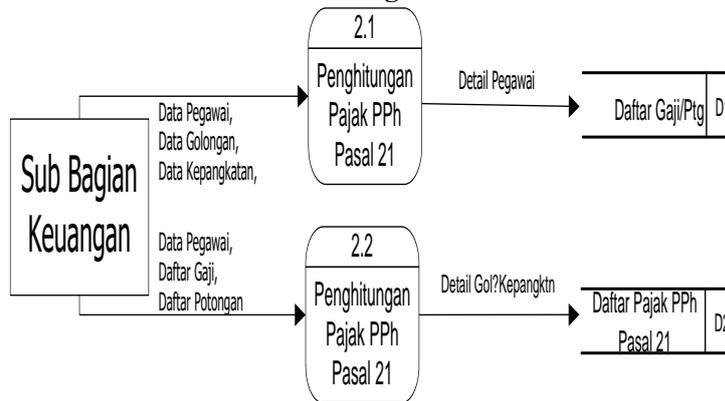
Gambar 6. Data Flow Diagram Level 0

**Data Flow Diagram Level 1 Untuk Proses 1 (Entry Data) Yang Diusulkan**



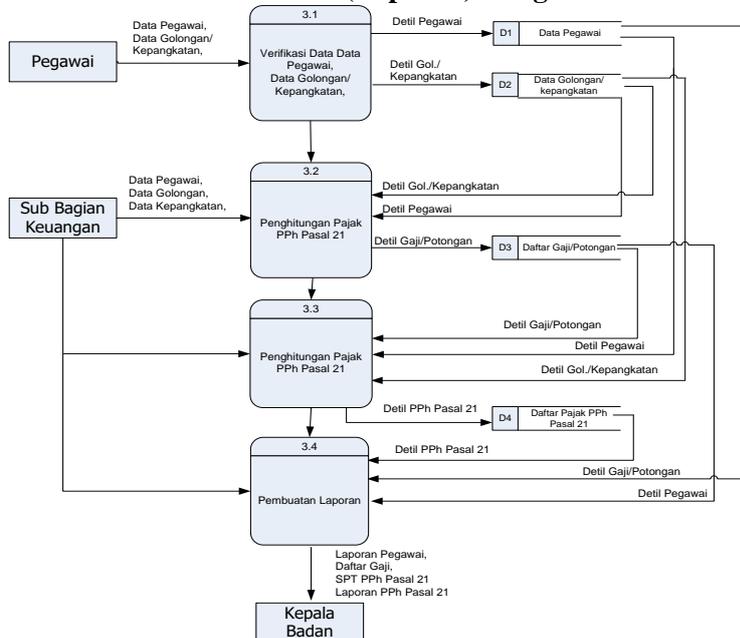
**Gambar 7. Data Flow Diagram Level 1 Untuk Proses 1**

**Data Flow Diagram Level 1 Untuk Proses 2 Yang Diusulkan**



**Gambar 8. Data Flow Diagram Level 1 Untuk Proses 2**

**Data Flow Diagram Level 1 Untuk Proses 3 (Laporan) Yang Diusulkan**



**Gambar 9. Data Flow Diagram Level 1 Untuk Proses 3**

## Perancangan Antar muka Tampilan Program Tampilan Menu Utama



Gambar 10. Tampilan Menu Utama

### Kelebihan Dan Kelemahan Sistem Usulan

#### Kelebihan Sistem Usulan

Adapun kelebihan dari sistem usulan ini adalah bahwa dalam aplikasi ini semuanya dijalankan pada sebuah sistem berbasis komputer, dan tugas dari user atau pengguna hanya melakukan penginputan sesuai dengan dokumen atau laporan perhitungan yang akan dibuat.

#### Kelemahan Sistem Usulan

Dengan menggunakan sistem usulan ini masih belum diandalkan karena memiliki kelemahan diantara sebagai berikut:

1. Belum terkoneksi ke host jaringan internet
2. Kode Pajak masih diinput secara manual
3. Dalam aplikasi ini hanya menunjukkan data dan laporan yang berkaitan dengan laporan perhitungan Pajak Tahunan PPh Pasal 21

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada mengenai Perancangan Aplikasi Perhitungan Pajak Tahunan PPh Pasal 21 pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah daerah/kewenangan provinsi, di bidang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam lintas dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Dengan menggunakan *Microsoft Access* dan bahasa pemrograman *Microsoft Visual Basic 6.0*, dalam perhitungan Pajak Tahunan PPh Pasal 21 dapat membantu mengefisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Dalam aplikasi ini administrasi tidak perlu menghabiskan waktu dengan dokumen-dokumen dari setiap Pegawai Negeri Sipil, jika aplikasi yang sudah dirancang ini dapat dimanfaatkan untuk menginput dan mengolah data Perhitungan Pajak Tahunan PPh Pasal 21.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Abdul Kadir & Terra CH.Triwahy uni. *Pengenalan Teknologi Informasi*. ANDI Yogyakarta. 2003
- [2]. Andi Kristanto. *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Gava Media. Yogyakarta. 2003.
- [3]. Aji Supriyanto. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Salemba Infotek. 2005.

- [4]. Al-Bahra bin Ladjamuddin. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2005.
- [5]. Davis, Gordon B, *Computer and Information Processing*, McGraw-Hill, 2000.
- [6]. Efferin, S., et al. *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008.
- [7]. Elmasri Ramez, Navathe Shamkant B. *Fundamentals of Database Systems, Edisi Ketiga*. Addison-Wesley Pub Co. New York. 2000.
- [8]. Kusumo, Aryo Suryo Drs., *Buku Latihan Pemrograman Database dengan Visual Basic 6.0*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta: 2002.
- [9]. Musanafi, *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta: Haji Masagung, 1989.
- [10]. Jogiyanto Hartono. *Analisis dan Disain, C.V Andi Offset*, Yogyakarta. 2001.
- [11]. Jogiyanto HM. *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan praktek Aplikasi Bisnis*. Andi. Yogyakarta. 2005.
- [12]. Kuncoro, Mudradjad. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*, Jakarta : penerbit Erlangga, 2003.
- [13]. Kadir, Abdul, *Konsep dan Tuntunan Praktis Basis Data*, Yogyakarta : Andi, 2000.
- [14]. Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003.
- [15]. Sugiyono. *Model Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- [16]. Sugiono. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2001
- [17]. Sukardji, *Untung. Sebuah analisis Konstruktif Perubahan Undang-Undang perpajakan Pertambahn Nilai 1984 dengan UU Nomor 18 Tahun 2000*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- [18]. Waluyono dan Ilyas. *Perpajakan Indonesia, Buku Satu*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002
- [19]. [WWW.pajak.go.id](http://WWW.pajak.go.id), [Id.wikipedia.org/wiki/pegawai\\_negeri](http://Id.wikipedia.org/wiki/pegawai_negeri)
- [20]. [WWW.korpri.or.id](http://WWW.korpri.or.id), ( wikipedia bahasa indonesia, ensiklopedia bebas)